



# **LAPORAN KOMWIL I-VI**





# KOMWIL I





# LAPORAN KOMISARIAT WILAYAH I

## 2023 - 2024

DISAMPAIKAN OLEH  
**SUSANTI DEWAYANI - WALI KOTA PEMATANG SIANTAR**





# Rakerwil I Pekanbaru



**SUA PEMUDA**



**KARNAVAL & PAWAI BUDAYA**





# REKOMENDASI KOMWIL I



## BERITA ACARA HASIL RAPAT KERJA KOMISARIAT WILAYAH I APEKSI DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2024

Pada hari ini, Jumat tanggal tiga Mei dua ribu dua puluh empat (3 Mei 2024) bertempat di Kota Pekanbaru, telah dilaksanakan Rapat Kerja Komisariat Wilayah I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang diikuti oleh seluruh Wali Kota anggota Komisariat Wilayah I dengan menghasilkan Kesepakatan Bersama sebagai berikut:

### A. REKOMENDASI KOMISARIAT WILAYAH I APEKSI

1. APEKSI mendorong Pemerintah menetapkan kebijakan yang berimplikasi langsung kepada masyarakat yang tidak menjadi kewenangan Pemerintah Kota seperti pengendalian inflasi dan kebijakan terhadap kenaikan harga bahan pokok dan transportasi.
2. APEKSI perlu memperjuangkan kebijakan keuangan sebagai berikut:
  - a. Mengubah kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan rasa Dana Alokasi Khusus (DAK) (sudah ditentukan peruntukan);
  - b. Pendelegasian penanganan banjir/sungai dan infrastruktur jalan nasional dan propinsi yang merupakan kewenangan pusat/propinsi agar diberikan ke Pemerintah Kota untuk pemeliharannya disertai dengan pengalihan anggaran;
  - c. Mendorong penyederhanaan proses Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan mendorong kebijakan keringanan bunga khusus dalam KPBU;
  - d. Kebijakan yang tegas tentang tipping fee dalam pengembangan waste to energy serta karbon kredit;
  - e. Mewajibkan PLN untuk melakukan transparansi terhadap pajak penerangan jalan dan tagihan listrik Listrik Penerangan Jalan Umum (LPJU) pada Pemerintah Kota.
3. APEKSI meminta agar bakal calon kepala daerah dalam menyusun visi dan misi mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) teknokrat 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.
4. APEKSI akan mendorong Pemerintah untuk melakukan pembagian PPH (Penambahan Pajak Penghasilan) bagi perusahaan yang beroperasi di wilayah Pemerintah Kota yang mempunyai perusahaan induk di wilayah lain di Indonesia dan perlu meminta agar kewenangan-kewenangan Daerah agar lebih diperluas pada urusan perpajakan dan retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 112 tahun 2022.
5. APEKSI mendorong Pemerintah memprioritaskan perubahan iklim dan dampaknya dalam perencanaan pembangunan Kota serta menyiapkan payung hukum yang memungkinkan adanya alternatif pembiayaan dan meningkatkan transparansi akses dan mekanisme pendanaan infrastruktur di bidang lingkungan.



## 6 POIN REKOMENDASI UNTUK 16 KEMENTERIAN

### ISU NASIONAL:

- Pemerintah segera mengeluarkan kebijakan yang berimplikasi langsung kepada masyarakat (pengendalian inflasi, kenaikan harga bahan pokok dan transportasi)
- Ketetapan Penyederhanaan proses kerjasama KPBU dan keringanan bunga khusus
- Mendorong kebijakan yang tegas tentang tipping fee dalam pengembangan waste to energy serta karbon kredit





**TERIMA KASIH**





# KOMWIL II





# LAPORAN KOMISARIAT WILAYAH II

## 2023 - 2024

DISAMPAIKAN OLEH KETUA KOMWIL II  
**EVA DWIANA - WALI KOTA BANDAR LAMPUNG**





# Rakerwil | Bandar Lampung







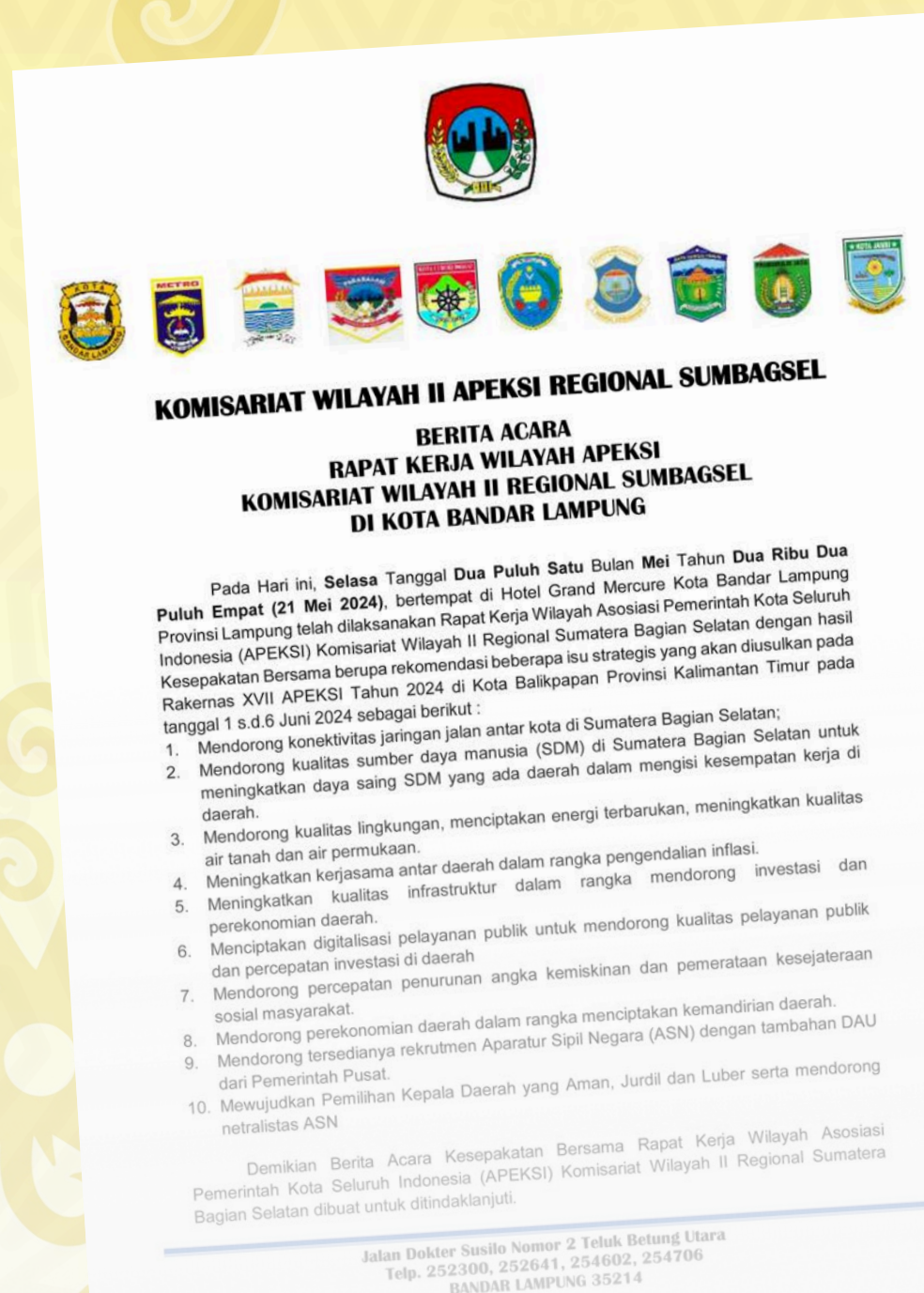
# REKOMENDASI KOMWIL II



## 10 POIN REKOMENDASI UNTUK 7 KEMENTERIAN

### ISU NASIONAL:

- Mendorong konektivitas jaringan jalan antar kota di Sumatera Bagian Selatan
- Memfasilitasi kerjasama antar daerah dalam rangka pengendalian inflasi
- Memfasilitasi percepatan digitalisasi pelayanan publik untuk mendorong kualitas pelayanan publik dan percepatan investasi di daerah
- Menambah DAU untuk anggaran P3K







**TERIMA KASIH**





# KOMWIL III





# LAPORAN KOMISARIAT WILAYAH III

## 2023 - 2024

DISAMPAIKAN OLEH KETUA KOMWIL III  
**HELLDY AGUSTIAN - WALI KOTA CILEGON**







# Forum Dispora I Yogyakarta





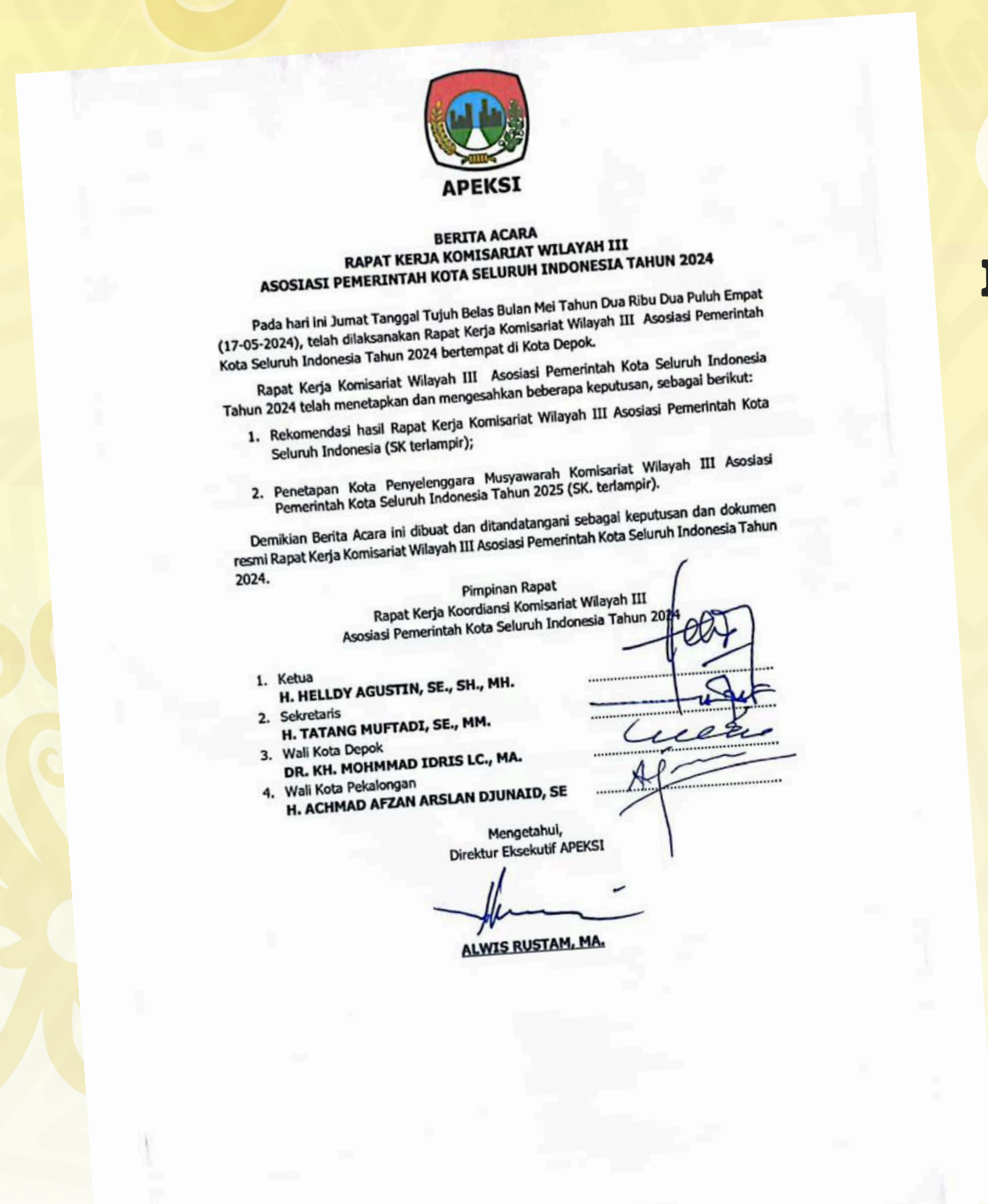
# Rakerwil | Depok







# REKOMENDASI KOMWIL III



26 POIN REKOMENDASI UNTUK 14 KEMENTERIAN

## ISU NASIONAL:

- Mendorong penggajian PPPK menggunakan DAU seluruhnya sehingga APBD dapat efektif dan efisien
- Mendorong penambahan anggaran stunting
- Mendorong pemerintah untuk melakukan penataan ulang Jabatan Struktural dan Fungsional.





**TERIMA KASIH**





# KOMWIL IV





# LAPORAN KOMISARIAT WILAYAH IV

## 2023 - 2024

DISAMPAIKAN OLEH  
**LALU MARTAWANG - ASISTEN 1 PEMERINTAH KOTA MATARAM**





# Pra Rakerwil I Blitar







# REKOMENDASI KOMWIL IV



## 13 POIN REKOMENDASI UNTUK 9 KEMENTERIAN

### ISU NASIONAL:

- Mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan keterbukaan perencanaan tata ruang dan penegakan hukum bagi pelanggaran perencanaan tata ruang
- Mendorong pemerintah merealisasikan pemenuhan sarana dan prasarana pada fasilitas umum bagi penyandang disabilitas
- Mendorong pemerintah untuk mengubah kebijakan mandatory spending bagi daerah yang sangat tergantung dengan dana transfer dari pemerintah pusat



#### KOMISARIAT WILAYAH IV

##### BERITA ACARA

PRA RAPAT KERJA KOMISARIAT WILAYAH IV KE-19  
ASOSIASI PEMERINTAH KOTA SELURUH INDONESIA  
TAHUN 2024

Setelah mencermati dan memperhatikan dengan seksama pandangan dan pokok – pokok pikiran Walikota peserta rapat pada hari Rabu, 22 Mei 2024 bertempat di Kota Blitar, maka Pra Rapat Kerja Komisariat Wilayah IV ke – 19 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2024, menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Dana Insentif Fiskal dari pusat harus menentukan rincian kegiatan.  
Usul juknis terkait Dana Insentif Fiskal.
2. Ekonomi kreatif
3. Kerjasama dengan daerah sekitar yang belum optimal.
4. Masih kurangnya pemenuhan sarana dan prasarana pada fasilitas umum bagi penyandang disabilitas;
5. Mitigasi Bencana; dengan isu strategis difokuskan pada upaya:
  - a. Penguatan kapasitas kelembagaan melalui Relawan Penanggulangan Bencana Kelurahan (RPBK) dan lainnya,
  - b. Optimalisasi kearifan lokal dalam mitigasi bencana,
  - c. Pertanian terintegrasi serta Penguatan infrastruktur
6. Optimalisasi keterbukaan perencanaan tata ruang dalam upaya memberikan kepastian dan peningkatan investasi di perkotaan serta penegakan hukum bagi pelanggaran perencanaan tata ruang.
7. Penanganan rumah kumuh
8. Penetapan besaran (prosentase) pokir DPRD dalam struktur APBD
9. Pengembangan infrastruktur yang berbasis kewilayahan
10. Peninjauan kembali oleh Pemerintah Pusat atas kebijakan mandatory spending bagi daerah yang sangat tergantung dengan dana transfer dari pemerintah pusat
11. Penurunan Kemiskinan
12. Penyesuaian SPPD yang proporsional
13. Regulasi dan dana kelurahan guna optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Demikian Kesepakatan Bersama rapat Kerja Komisariat Wilayah IV APEKSI dibuat untuk ditindaklanjuti.

Blitar, 22 Mei 2024





**TERIMA KASIH**





# KOMWIL V





# LAPORAN KOMISARIAT WILAYAH V

## 2023 - 2024

DISAMPAIKAN OLEH KETUA KOMWIL V  
**BASRI RASE - WALI KOTA BONTANG**





# Rakerwil | Tarakan





# Rakerwil I Banjarbaru



**OLAHRAGA**



**TANAM POHON**





# REKOMENDASI KOMWIL V



## 19 POIN REKOMENDASI UNTUK 6 KEMENTERIAN

### ISU NASIONAL:

- Merealisasikan pengembangan wilayah Kalimantan dalam jangka panjang sebagai: Superhub Ekonomi Nusantara
- Mendorong pemerintah menjamin hak putra/putri daerah Kalimantan untuk turut serta dalam penerimaan ASN minimal 30%
- Mendorong pemerintah untuk akselerasi pembangunan dan penguatan stabilitas pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan dan IKN dengan pertimbangan risiko bencana terutama mitigasi risiko pada wilayah perkotaan dan pedesaan
- Mendorong percepatan transportasi udara



#### KOMISARIAT WILAYAH V APEKSI REGIONAL KALIMANTAN

#### BERITA ACARA RAPAT KERJA KOMISARIAT WILAYAH V APEKSI REGIONAL KALIMANTAN PERIODE APRIL 2024

Setelah mendengar, memperhatikan dan mencermati secara seksama pandangan dan pokok-pokok pikiran yang disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Ir. Roy Rizali Anwar, ST, MT, Ketua Dewan Pengurus APEKSI diwakili oleh Wali Kota Bontang selaku Wakil Ketua I Bidang Pemerintahan dan Otonomi sekaligus Ketua Komwil V APEKSI Regional Kalimantan Basri Rase, S.IP, M.Si dan penyampaian Best Practice oleh Wali Kota Banjarbaru HM. Aditya Mufti Ariffin SH, MH, serta masukan dan tanggapan dari Wali Kota peserta rapat kerja, maka pada hari ini Minggu tanggal Dua Puluh Satu bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (21-04-2024) bertempat di Kota Banjarbaru, dirumuskan hasil pelaksanaan Rapat Kerja Komisariat Wilayah V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Regional Kalimantan Periode April 2024 dengan Kesepakatan Bersama sebagai berikut :

1. Perlu tetap terus memperjuangkan kepada Pemerintah Pusat melalui Dewan Pengurus APEKSI dan Komitmen Para Wali Kota Regional Kalimantan untuk implementasi atas Program Kerja Komisariat Wilayah V APEKSI Regional Kalimantan Tahun 2024.
2. Pemaparan Best Practice yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru dengan tema Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia mewujudkan Banjarbaru Juara, terbukti berhasil dalam pengendalian inflasi, inovasi Mal Pelayanan Publik digital dan berbagai prestasi yang telah di raih Pemerintah Kota Banjarbaru, perlu terus dilakukan sharing gagasan dan pengalaman sesama Anggota Komwil V APEKSI Regional Kalimantan.
3. Rekomendasi Rapat Kerja Komisariat Wilayah V APEKSI Regional Kalimantan :
  - a. Pembangunan wilayah Kalimantan akan diarahkan kepada percepatan pertumbuhan, diversifikasi ekonomi, dan pelestarian alam
  - b. Mendorong terwujudnya Ekonomi Kalimantan sebagai satu kesatuan wilayah perekonomian dan bertumpu pada industrialisasi yang berbasis hilirisasi SDA.





**TERIMA KASIH**





# KOMWIL VI





# LAPORAN KOMISARIAT WILAYAH VI

## 2023 - 2024

DISAMPAIKAN OLEH KETUA KOMWIL VI  
**TAUHID SOLEMAN - WALI KOTA TERNATE**



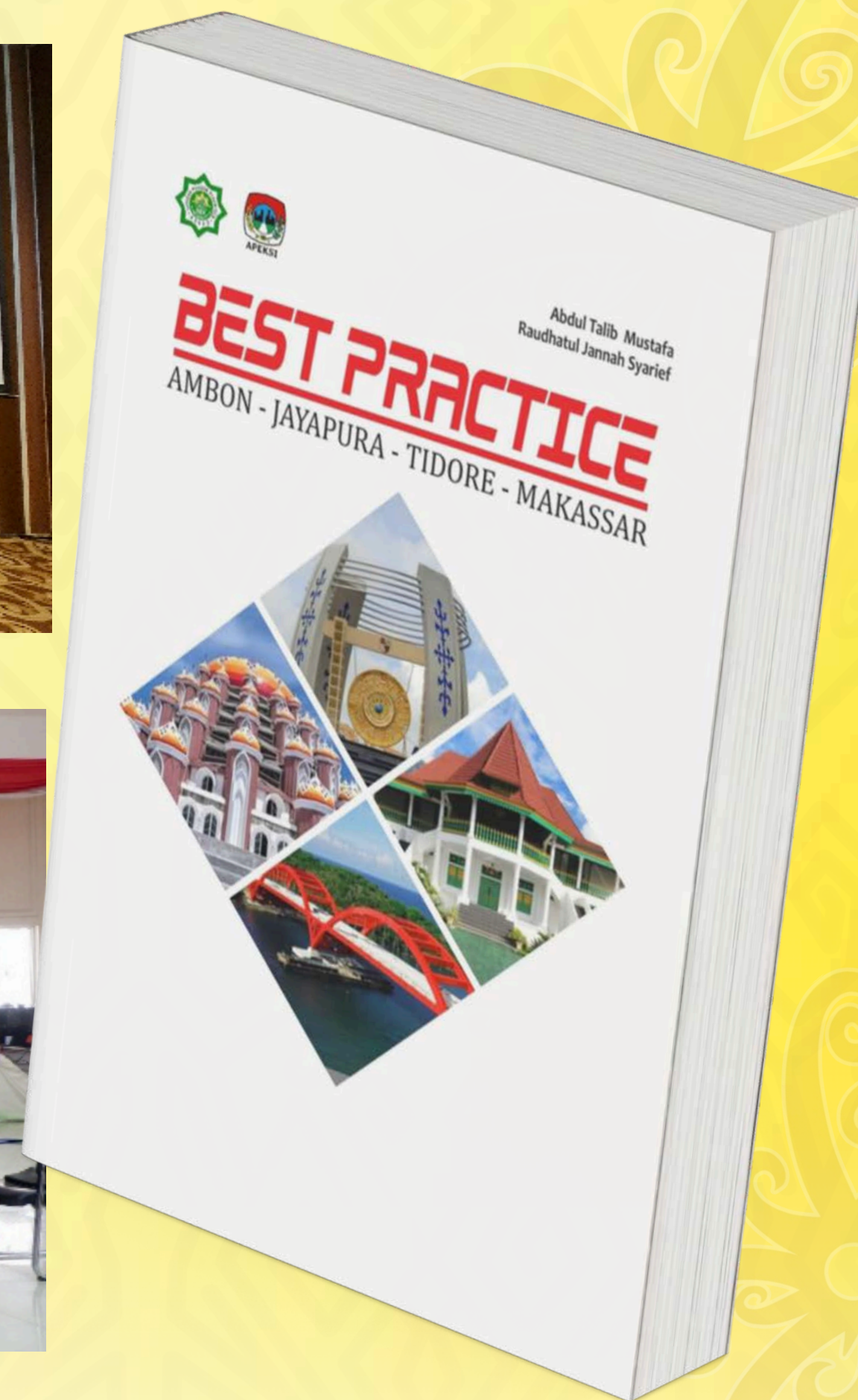




**RAPAT TEKNIS - MAKASSAR**



**LOKAKARYA - PALOPO**





# Makassar



**PRA MUSKOMWIL**



**MUSKOMWIL**



**WALIKOTA TERNATE  
TERPILIH SEBAGAI  
KETUA KOMISARIAT WILAYAH VI**





# REKOMENDASI KOMWIL VI



## 5 POIN REKOMENDASI UNTUK PRESIDEN & 4 KEMENTERIAN

### ISU NASIONAL:

- Mendesak untuk mengubah ketentuan tentang biaya perjalanan dinas dari at cost menjadi lumpsum dalam Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Regional
- Merealisasikan keberlanjutan adanya Dana Kelurahan untuk mendukung peningkatan pengelolaan dan pembangunan di Tingkat Kelurahan, serta mengantisipasi terjadinya ketimpangan kemajuan antara desa dan kelurahan
- Mendesak pemerintah untuk menggunakan data-data kependudukan penerima berbagai bantuan yang diperbaharui oleh Pemerintah daerah



KEPUTUSAN  
MUSYAWARAH KOMISARIAT WILAYAH VI KE – X  
ASOSIASI PEMERINTAH KOTA SELURUH INDONESIA  
SULAWESI SELATAN, SULAWESI UTARA, SULAWESI TENGAH,  
SULAWESI TENGGARA, GORONTALO, MALUKU, MALUKU UTARA, PAPUA DAN PAPUA BARAT

NOMOR : 07/SK/MUSKOMWIL VI – X/APEKSI/2024

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS KOMISARIAT WILAYAH VI APEKSI  
BESERTA SEKRETARIAT KOMISARIAT WILAYAH VI APEKSI  
SULAWESI SELATAN, SULAWESI UTARA, SULAWESI TENGAH, SULAWESI TENGGARA, GORONTALO,  
MALUKU, MALUKU UTARA, PAPUA DAN PAPUA BARAT

MUSYAWARAH KOMISARIAT WILAYAH VI KE – X APEKSI  
ASOSIASI PEMERINTAH KOTA SELURUH INDONESIA

Menimbang:

- a. Bahwa untuk kelancaran jalannya organisasi Komisariat Wilayah VI APEKSI meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APEKSI dipandang perlu dibentuk pengurus Komisariat Wilayah VI APEKSI Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat Periode 2024 – 2025
- b. Bahwa untuk dimaksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Musyawarah Komisariat Wilayah VI ke – X Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)





**TERIMA KASIH**